



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Pengantar Penulis Diselewengkan, Digaruk, dan Dijarah

"Uang rakyat diselewengkan, uang rakyat digaruk, uang rakyat dijarah."

Kalimat-kalimat tak sedap di atas, tentunya sudah sering kita dengar dan kita baca. Ia seakan-akan telah menjadi tontonan dan makanan empuk kita sehari-hari, bila kita menyimak informasi, baik itu pada *headline* surat kabar ataupun berita utama pada siaran media televisi. Aksi penyelewengan, penggarukan, maupun penjarahan uang rakyat ini, jika dilihat dalam konteks Indonesia pada umumnya, dan provinsi Riau pada khususnya adalah sebuah realita yang tidak dapat kita dipungkiri lagi keabsahannya.

Aksi ini benar-benar terjadi. Peristiwa ini betul-betul nyata adanya. Tidak usah dibantah lagi. Jangan sampai dicarikan justifikasinya. Sebab, banyak sudah contoh kasus yang dapat kita jadikan referensi. Contoh terkecil adalah terlihat di pelupuk mata kita, bagaimana tidak tepat



sasarannya dana pemberdayaan ekonomi rakyat yang tertuang dalam RAPBD, yang terjadi pada beberapa daerah di Indonesia. Lebih detailnya lagi, lihatlah pada implementasi RAPBD Riau tahun 2001 lalu. Dari sekian jumlah dana yang dianggarkan, realisasinya yang betul-betul menyentuh masyarakat, hanya sekian persennya saja. Selebihnya?

Selebihnya, sudah tidak menjadi rahasia umum lagi bahwa sisanya tentu lebih banyak diselewengkan, digaruk dan dijarah oleh aparat yang tidak bertanggung jawab. Dengan menghalalkan berbagai cara dan bermacam alasan, seperti misalnya biaya untuk perjalanan dinaslah, biaya administrasi, biaya identifikasi dan seleksi calonlah, maupun dana untuk pelatihan-pelatihan, yang kesemuanya ini hampir menelan biaya lebih dari setengah yang dianggarkan. Ini masih yang melalui prosedur. Bagaimana dengan yang di luar prosedur, seperti pemotongan-pemotongan gelap misalnya?

Di tengah-tengah jargon pemerintah untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan —terjadinya aksi penyelewengan, penggarukan dan penjarahan ini— terhadap dana yang justru diperuntukkan bagi pemberdayaan ekonomi rakyat, tentunya menjadi bertolak belakang dari tujuan semula. Oleh sebab itu, adalah suatu hal yang wajar, jika pada akhirnya pemberdayaan ekonomi rakyat —program ini menjadi Pilar Utama Pembangunan di Riau— masih terasa hambar dan menyedihkan.

Kita tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya bila



para aktor penjarahan ini menyunggingkan senyum kepuasan, karena *booming* dana yang begitu besar akan masuk ke kantong pribadi mereka, sementara pada sisi lain jeritan rakyat menjadi tidak berarti apa-apa. Ironisnya lagi, para anggota dewan setempat (DPRD), yang merupakan wakil mereka rakyat, untuk menyalurkan aspirasinya, tidak memiliki *political will* dalam menyikapi persoalan ini. Sehingga pada akhirnya, pemberdayaan ekonomi rakyat ini hanya menjadi sebuah tragedi besar yang cukup menyedihkan.

Selain persoalan adanya aksi penyelewengan, pengurangan dan penjarahan ini, masalah penting lainnya yang juga menjadi penghambat dalam upaya mengimplementasikan proses pemberdayaan ekonomi rakyat, juga datang dari belum adanya model pendekatan yang terpadu dan terangkai secara apik. Masing-masing sektor masih kelihatan saling berdiri sendiri dan maju dengan programnya, tanpa memikirkan kait-kelindannya dengan program yang lain. Padahal dalam konsep pemberdayaan ekonomi, sangat penting untuk diperhatikan beberapa hal yang menjadi kunci berhasil atau gagalnya suatu program.

Di antara beberapa kunci yang dapat kita jadikan sebagai tolak ukur berhasil tidaknya suatu konsep dapat dilihat dari, yaitu kepemilikan terhadap aset ekonomi, akses terhadap pasar, kapabilitas dan kompetensi usaha, ruang gerak yang adil dan demokratis, adanya saling keterkaitan antar pelaku ekonomi yang terbentuk atas dasar input-output, serta aspek kepedulian terhadap lingkungan usaha. Penataan aspek-aspek tersebut di ataslah yang akan mampu membawa rakyat pada suasana kemajuan ekonomi yang berkesinambungan. Tanpa semua itu, konsep pemberdayaan ekonomi



rakyat hanya akan menjadi ajang “seleweng-menyeleweng,” “garuk-menggaruk,” dan “jarah-menjarah” belaka.

Satu hal yang pasti, kita sesungguhnya tidak ingin melihat persoalan ini menjadi berlarut-larut, tanpa ada *win-win solution* yang dapat kita jadikan penawar untuk mengobati penyakit kronis ini. Ke depan, setidaknya ada beberapa *entry point* yang sangat dibutuhkan dalam kebijaksanaan strategis demi terhindarnya rakyat dari keadaan yang terombang-ambing.

Pertama, implementasi demokrasi ekonomi harus dijalankan secara konsisten melalui kebijaksanaan pembangunan yang memihak rakyat. Penting sekali diupayakan agar rakyat memiliki kesempatan untuk memperoleh aset ekonomi yang mampu menjamin kehidupan ekonominya secara berkelanjutan.

Kedua, eksploitasi sepihak yang membuat rakyat tidak berperan dalam pembangunan harus segera dihentikan. Sayangnya, ini belum menjadi perhatian yang serius dari pemerintah Riau. Dalam perencanaan pembangunan misalnya, prinsip yang diterapkan masih bersifat *top-down*.

Ketiga, hambatan-hambatan struktural yang selama ini ditemui di lapangan harus segera dihapus melalui koordinasi yang integratif. Semua pihak yang terkait dengan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat mesti memiliki kesamaan visi dan kinerja mutu yang optimal.

Mengakhiri pengantar ini, dengan kerendahan hati patut saya akui bahwa buku ini tidak akan hadir di tangan pembaca tanpa uluran tangan atau kerjasama dari berbagai pihak.



Kepada Bapak Dr. Sjahrir (Ketua PIB), yang di tengah kesibukannya masih sempat meluangkan waktunya untuk sedikit memberikan catatan (pengantar) dalam buku sederhana ini. Para pimpinan dan rekan-rekan di media cetak yang telah bersedia menampilkan percikan-percikan pemikiran saya dalam bentuk lisan maupun tulisan, patut saya berikan penghargaan.

Penghargaan juga saya berikan kepada Sdr. Zulkarnain, Redaktur SKK *Bahana Mahasiswa* Universitas Riau, yang dengan ketekunannya telah berhasil menyunting tulisan saya yang berkebaran di media massa menjadi buku yang sekarang berada di tangan pembaca. Sdr. Elmustian Rahman dari *Unri Press* Pekanbaru atas kesediaannya menerbitkan buku ini, juga patut saya hargai di sini. Dan, kepada semua yang telah ikut berjasa membantu terselesaikannya buku ini, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, saya ucapkan ribuan terima kasih.

Satu hal yang pasti, saya menyadari bahwa buku ini tentunya jauh dari kesempurnaan. Bak kata orang bijak, “tiada komputer yang tidak dimasuki virus”, begitu juga dengan karya ini, belumlah lepas dari kekurangan-kekurangan. Untuk itu, tangan saya selalu terbuka menerima kritik dan saran pembaca, demi perbaikan esok hari.***

Pekanbaru, 27 Oktober 2001
Edyanus Herman Halim, SE., MS



Pengantar DR. Sjahrir

Keprihatinan Kita Melihat Nasib Rakyat

Pikiran yang berkecamuk di benak rakyat tentang makna pembangunan saat ini adalah pengorbanan. Lebih dari 32 tahun lamanya hidup di bawah rezim otoriter Soeharto, rakyat berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Secara fisik, investasi besar yang diintrodusir melalui program dan berbagai proyek memang dapat dilihat, namun pengalaman menunjukkan bahwa “tumbal-tumbal” pembangunan senantiasa ada di sana-sini.

Pelaksanaan pembangunan selalu saja menempatkan rakyat sebagai korban. Sementara para penguasa dan pengusaha, tetap berada pada pihak yang diuntungkan. Bukti konkret tentang rakyat yang selalu dikesampingkan, secara lugas dapat dicermati pada beberapa kasus yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Pengalaman di Riau misalnya, sebagaimana yang diamati dan ditulis Saudara Edyanus dalam buku ini, jelas sekali menunjukkan bahwa eksploitasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumutikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



terhadap sumberdaya alam Riau, merupakan keputusan sepihak yang sangat tidak menguntungkan rakyat. Tidak hanya di daerah, di kota-kota besar pun, marginalisasi hak rakyat juga terjadi. Bila dikaitkan dengan eksistensi masyarakat daerah, keadaannya malah makin parah.

Buku *Siapa Menjarah Uang Rakyat? Tragedi dan Upaya Pemberdayaan Ekonomi Riau Menuju Alaf Baru* yang ditulis Saudara Edyanus Herman Halim ini, pada dasarnya mendeskripsikan banyak hal yang harus kita pikirkan dalam mencermati kompleksnya persoalan yang melanda perekonomian bangsa kita dewasa ini. Mulai dari tantangan ekonomi yang akan kita hadapi dalam menyongsong globalisasi, pemberdayaan usaha kecil dan menengah, hingga persoalan program ekonomi rakyat, yang selama ini tidak lebih dari sekadar “retorika” belaka.

Hal yang cukup menarik yang perlu saya tekankan dalam buku ini adalah pembahasannya tentang fenomena pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Seperti kita ketahui bersama, usaha kecil dan menengah telah terbukti memberikan kontribusi yang baik sekali kepada pertumbuhan ekonomi tahun 2000 dari sisi kegiatan konsumsi serta pertumbuhan di sektor ekspor. Dilihat dari potensi yang begitu besar dari usaha kecil dan menengah ini, dibutuhkan peningkatan upaya yang berkesinambungan oleh masyarakat dan pemerintah.

Di dalam upaya tersebut termasuk proses pelatihan, pembukaan dan pengembangan pasar, baik pada pasar ekspor maupun pasar nasional, serta bantuan teknis yang memungkinkan usaha kecil dan menengah dapat membuat proposal teknis bagi pemberian kredit. Hal tersebut, dapat



dilakukan melalui koordinasi kerjasama antara departemen keuangan, departemen perindustrian dan perdagangan, dan kementerian negara yang mengurus usaha kecil dan menengah, serta koperasi.

Selain itu, amat penting untuk membuat monitoring secara nasional tentang perkembangan usaha kecil dan menengah, serta koperasi yang tumbuh dari bawah (*bottom up*) dan sisi penguatan kelembagaan perusahaan-perusahaan dan koperasi yang dapat dikerjakan melalui kerjasama dengan Bappenas dan Bappeda. Dalam hal ini, monitoring kegiatan kelembagaan tersebut dapat menjadi bahan bagi sektor keuangan untuk melihat kapasitas, potensi, dan prospek usaha-usaha kecil dan menengah tersebut, sekaligus mengembangkan kemungkinan pola pembiayaannya.

Pada akhirnya, ke depan, kita sangat mengharapkan peran usaha kecil dan menengah ini bisa menjadi barometer bagi kebangkitan ekonomi nasional yang berlandaskan prinsip kerakyatan. Dengan begitu, pembangunan betul-betul menempatkan rakyat pada posisi penting. Semua ini, pada dasarnya ditujukan demi berlangsungnya landasan kebijaksanaan bagi restrukturisasi, rehabilitasi dan pemulihan ekonomi nasional. Yang terpenting adalah rakyat tahu kepada siapa mereka meletakkan kepercayaan dan harapannya itu.

Melalui buku ini, Saudara Edyanus mencoba mengungkapkan keprihatinannya atas kesewenang-wenangan para penguasa terhadap nasib rakyat kecil. Dengan bahasanya yang lugas dan tajam, ini dapat dilihat dari judul besar bukunya 'Siapa Menjarah Uang Rakyat', dia mencoba mengingatkan kita semua bahwa selama ini slogan



pemberdayaan ekonomi rakyat hanyalah sekadar retorika belaka. Dana yang dianggarkan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat tersebut, lebih banyak diselewengkan, atau dalam bahasa Edyanus-nya “dijarah” oleh aparat yang tidak bertanggung jawab, dibandingkan dengan yang sampai ke tangan rakyat, pemiliknya yang sah.***

Jakarta, Oktober 2001

Dr. Sjahrir

(Ketua Perbimpunan Indonesia Baru)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Daftar Isi

Pengantar Penulis	
Diseleangkan, Digaruk, dan Dijarah	9
Pengantar Dr. Sjahrir	
Keprihatinan Kita Melihat Nasib Rakyat	13
Daftar Isi	19
Bagian Satu:	
Prospek dan Tragedi Perekonomian Riau	
Prospek Ekonomi Riau Memasuki Alaf Baru	23
Fenomena Politik dan Prospek Ekonomi Riau 2001 (1)	29
Fenomena Politik dan Prospek Ekonomi Riau 2001 (2)	34
APBN 2001: Implikasi "Pelecehan" Riau	39
IMS-GI dan Riau: Sebuah Perkawinan tak Seimbang	44
Krisis dan Keterpurukan Investasi Riau	50
Catatan Kecil untuk Kadinda Riau (1) (<i>Mencermati "Deklarasi Bali"</i>).....	56
Catatan Kecil Untuk Kadinda Riau (2) (<i>Bercermin pada "Kesepakatan Adelaide"</i>).....	61
Signifikansi Embargo Ekonomi Riau	67
	19



Bagian Dua:

Ekonomi Rakyat: Pemberdayaan atau Penjarahan?

Memberdayakan Ekonomi Rakyat (<i>Dalam Perspektif Adat Kuantan Singingi</i>)	75
Signifikansi Industri Berbasis Rakyat	80
Siapa “Menjarah” Uang Rakyat Riau? (<i>Implementasi Ekonomi Kerakyatan RAPBD Riau 2001</i>)	85
“Retorika” Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	90
Pemberdayaan Ekonomi “Dilempari” Rakyat	95
Pembangunan, Pemerataan dan Keunggulan Bersaing	100
IDT: Dari Miskonsepsi sampai Penjajahan Ekonomi	108

Bagian Tiga:

Masih Adakah Tempat Untuk “Sikecil”?

Secangkir Kopi, Segudang Informasi (<i>Kunci Sukses “Po- sitioning” Usaha Kecil Menengah</i>)	117
Mendukung Pemberdayaan UKM Riau	122
Model “Community Development” (<i>Untuk Mengurangi Kemiskinan Masyarakat Riau</i>)	127
Mengapa Persepsi tak Pernah Sama? (<i>Menggugat Kebijakan Community Development Riau</i>)	133
APBC, Industri Kecil dan Kesiapan Birokrasi	138
Membakukan Peran Usaha Kecil	144
Prospek UKM Menghadapi Era Otonomisasi	149

Sumber-sumber Tulisan	153
-----------------------------	-----

Tentang Penulis	155
-----------------------	-----